



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

- Nama : **SHAHDEVI NANDAR KURNIAWAN**
- Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA**
- NHK : **945891**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **10.250.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 259 m2/259 m2 di KOTA MALANG ,
LAINNYA Rp. 1.750.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 417 m2/417 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/385 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/224 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **661.600.000**

- MOBIL, HONDA CIVIC 1.5 TC CVT ES Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 220.000.000
- MOTOR, HAPPY HP70 S SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 900.000
- MOBIL, TOYOTA MINIBUS RAIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000
- LAINNYA, SEPEDA POLYGON Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
400.000
- LAINNYA, SEPEDA MARIN CALIFORNIA Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **40.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.230.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.656.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.837.600.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.837.600.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.